ISSN 3123-2973
JURNAL PAJAK POPULIS
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/populis
Volume 2 (1) 2026, 250 - 255

PELATIHAN PERHITUNGAN HARGA POKOK PENJUALAN UNTUK UMKM JARINGAN WIRAUSAHA KOTA DEPOK

Lukmanul Hakim[1*], Ghea B Astrid[2] , Sunanto[3]
[1]Universitas Pamulang, [2] Universitas Pamulang, [3] Universitas Pamulang
Email: 02722@unpam.ac.id

Article History: Received on 24 Juni 2026, Revised on 10 Juli 2026, Published on 20 Juli 2026

ABSTRACT

Referring to the Tridharma of higher education, which includes education, research, and community service, universities should be able to implement these dharma functionally and integrated. Community service, as one of the dharma of higher education, occupies a strategic position in drawing and educating the community to improve the quality of life. The most realistic form of this guidance is none other than providing supplies through skills training and mentoring that are considered useful for the local community. The calculation of the Cost of Goods Sold (COGS) by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) is still not entirely accurate, therefore the majority of them have difficulty in setting appropriate selling prices. Limited financial knowledge coupled with the lack of disciplined business bookkeeping are some of the problems faced by the MSME Entrepreneur Network of Depok City. The purpose of this activity is to provide education in determining the appropriate cost of goods sold, so that the set margin is not too low compared to the selling price. Furthermore, socialization is also provided regarding the process of creating business bookkeeping, which is in accordance with MSME business standards. It also provides an introduction to startup strategies for entrepreneurs in the Depok City Entrepreneur Network and supports their business activities. It is hoped that this PKM initiative will transform and be accepted by the community and student participants, enabling them to become active, skilled, and resourceful individuals during the pandemic.

***Keywords**: Cost of Goods Sold, Micro, Small, Medium Enterprises*

ABSTRAK

Mengacu pada Tridarma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, maka hendaknya perguruaan tinggi dapat melaksanakan tridharma tersebut secara fungsional dan terpadu. Pengabdian pada masyarakat sebagai salah satu dharma perguruan tinggi menepati posisi yang strategis dalam menimba dan mendidik masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adapun wujud pembinaan tersebut yang dianggap paling realistis tidak lain, memberikan pembekalan melalui pelatihan keterampilan dan pendampingan yang dianggap berguna bagi khalayak masyarakat setempat. Perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih belum sepenuhnya tepat, oleh karena itu mayoritas dari para pelakunya kesulitan dalam menetapkan harga jual yang sesuai. Terbatasnya pengetahuan keuangan ditambah tidak adanya pembukuan usaha secara disiplin menjadi beberapa permasalahan dari UMKM Jaringan Wira Usaha Kota Depok. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan edukasi dalam menentukan harga pokok produksi yang tepat, sehingga margin yang ditetapkan tidak terlalu rendah dengan harga jual. Tidak hanya itu, sosialisasi juga diberikan terkait proses pembuatan pembukuan usaha, yang sesuai dengan standar usaha pedagang UMKM. Serta pengenalan strategi memulai usaha untuk wirausahawan di Jaringan Wira Usaha Kota Depok dan untuk membantu kegiatan usaha mereka. Diharapkan dengan adanya PKM ini medset atau pola pikir dapat berubah dan diterima oleh masyarakat maupun mahasiswa peserta PKM itu sendiri sehingga menjadi individu yang aktif terampil dan cerdas pada saat pandemi.

Kata kunci : Harga pokok Produksi, Usaha Kecil Mikro Menengah

PENDAHULUAN

UMKM Jaringan Wira Usaha Kota Depok menjadi salah satu pilihan untuk penyuluhan mengenai Pelatihan Perhitungan Harga Pokok Penjualan. Pertumbuhan dan perkembangan kewirausahaan ini sangat penting dalam membantu meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. UMKM memegang peranan yang cukup signifikan dalam perekonomian, UMKM terbukti tangguh ketika terjadi Krisis Ekonomi 1998, hanya sektor UMKM yang bertahan dari kolapsnya ekonomi, sementara sektor yang lebih besar justru tumbang (Aziza et al., 2018). UMKM Jaringan Wira Usaha Kota Depok pada umumnya mempunyai kesempatan untuk berkembang ke tingkat industri yang lebih besar.

Keterbatasan literasi keuangan menyebabkan penetapan harga pokok produksi yang tidak sesuai, serta tidak adanya pembukuan usaha secara disiplin dan benar oleh para pelaku UMKM nya. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia Harga Pokok Produk menurut Ikatan Akuntan Indonesia meliputi semua biaya bahan langsung yang dipakai, upah langsung serta biaya produksi tidak langsung, dengan perhitungan saldo awal dan saldo akhir barang dalam pengolahan .Tujuan penentuan HPP adalah untuk menentukan harga jual produk, memantau realisasi biaya, menghitung laba rugi periodik dan menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca (Mulyadi, 2005) Dan tentunya biaya ini harus diperhitungkan secara akurat. Namun tidak demikian dengan para UMKM yang tergabung di Jaringan Wirausaha Kota Depok. Mayoritas para pelakunya masih buta terkait perhitungan HPP. Hal inilah yang menjadi mata rantai permasalahan yang terjadi di UMKM tersebut. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan edukasi terkait cara penghitungan Harga Pokok Produksi, pembuatan pembukuan sederhana, serta kiat-kiat dalam memulai usaha.

Mitra dalam kegiatan ini adalah pelaku UMKM yang tergabung dalam Jaringan Wirausaha Kota Depok. Secara umum, profil mitra menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha merupakan usaha mikro dan kecil dengan skala produksi terbatas. Usaha-usaha tersebut dijalankan secara mandiri atau berbasis keluarga, dengan jumlah tenaga kerja antara 1 hingga 5 orang. Dari segi pendidikan, sebagian besar pelaku usaha memiliki latar belakang pendidikan menengah, sehingga pemahaman terhadap manajemen keuangan masih terbatas.

Dalam jangka panjang, kondisi ini menghambat transformasi UMKM dari usaha informal menjadi entitas bisnis yang terstruktur dan berkelanjutan. Ketidakpatuhan pajak juga menciptakan citra negatif yang dapat mempengaruhi kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Oleh karena itu, intervensi melalui program literasi pajak menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan di Indonesia. Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan sarana praktik, kurangnya tenaga pengajar yang memiliki pengalaman industri, serta perlunya peningkatan kualitas manajemen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, akses terhadap pelatihan dan pendampingan masih terbatas, sehingga pelaku usaha kesulitan untuk meningkatkan kapasitas diri. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital yang pesat belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh mitra, baik dalam hal pemasaran maupun pencatatan keuangan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun mitra memiliki potensi yang besar untuk berkembang, terdapat berbagai permasalahan mendasar yang perlu segera diatasi. Salah satu aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian adalah kemampuan dalam menghitung Harga Pokok Penjualan (HPP), karena hal ini berkaitan langsung dengan keberlanjutan usaha.

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN PKM

Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan untuk menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas dalam periode tertentu. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sangat penting

bagi berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, seperti pemilik usaha, manajemen, investor, kreditur, pemerintah, dan pihak lainnya yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting karena dapat menjadi alat untuk mengetahui tingkat keuntungan usaha, mengendalikan biaya, serta mengevaluasi perkembangan usaha dari waktu ke waktu.

Bagi UMKM, keberadaan laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai dasar dalam memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Banyak lembaga perbankan mensyaratkan laporan keuangan sebagai salah satu dokumen utama dalam pengajuan kredit usaha. Oleh karena itu, kemampuan menyusun laporan keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha.

Harga Pokok Penjualan

Harga Pokok Penjualan (HPP) merupakan salah satu konsep penting dalam akuntansi biaya dan manajemen keuangan. HPP adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau menghasilkan barang yang kemudian dijual kepada konsumen. Perhitungan HPP bertujuan untuk mengetahui besarnya biaya yang melekat pada produk sehingga perusahaan dapat menentukan harga jual yang tepat dan memperoleh laba yang diharapkan. Dalam perusahaan dagang, HPP dihitung berdasarkan nilai persediaan barang dagangan yang dijual selama periode tertentu. Rumus umum HPP pada perusahaan dagang adalah sebagai berikut:

HPP = Persediaan Awal + Pembelian Bersih – Persediaan Akhir.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Keberadaan UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran, serta mendorong pemerataan pembangunan ekonomi. Di berbagai daerah, termasuk Kota Depok, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat karena sebagian besar pelaku usaha menjalankan bisnis dalam skala mikro dan kecil yang tersebar di berbagai sektor usaha.

Kota Depok merupakan salah satu kota yang berkembang pesat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Letaknya yang strategis dan berbatasan langsung dengan wilayah Daerah Khusus Jakarta menjadikan Depok sebagai daerah dengan potensi ekonomi yang cukup besar. Pertumbuhan jumlah penduduk, meningkatnya aktivitas perdagangan, serta berkembangnya sektor jasa dan industri kreatif menjadi faktor yang mendorong tumbuhnya UMKM di wilayah ini. Oleh karena itu, pengembangan UMKM menjadi salah satu fokus penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Depok.

Upaya Pengembangan UMKM di Kota Depok

Pemerintah Kota Depok bersama berbagai stakeholder terus melakukan berbagai program untuk mendukung perkembangan UMKM. Program tersebut meliputi pelatihan kewirausahaan, pelatihan digital marketing, pendampingan legalitas usaha, fasilitasi sertifikasi produk, akses pembiayaan, serta pelatihan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan. Selain itu, keberadaan komunitas dan jaringan wirausaha di Kota Depok juga menjadi sarana bagi para pelaku UMKM untuk berbagi pengalaman, memperluas jaringan bisnis, dan meningkatkan kapasitas usaha. Melalui kolaborasi yang baik antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat, UMKM di Kota Depok diharapkan mampu berkembang lebih maju, berdaya saing tinggi, serta memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap perekonomian daerah.

METODE PELAKSANAAN PKM

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema “Pelatihan Pembuatan Harga Pokok Penjualan (HPP) pada UMKM Jaringan Wirausaha Kota Depok” dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif. Pendekatan partisipatif dipilih agar peserta tidak hanya menjadi penerima materi, tetapi juga terlibat secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Sementara itu, pendekatan edukatif bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta melalui proses pembelajaran yang sistematis, praktis, dan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM.

Metode pelaksanaan dirancang untuk membantu peserta memahami konsep dasar Harga Pokok Penjualan (HPP), mengidentifikasi komponen biaya usaha, serta mampu melakukan perhitungan HPP secara mandiri. Pelaksanaan kegiatan juga menitikberatkan pada praktik langsung menggunakan data usaha yang dimiliki peserta sehingga hasil pelatihan dapat diterapkan secara nyata dalam kegiatan usaha sehari-hari.

1. Pendekatan Kegiatan
   Kegiatan dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan praktik langsung, sehingga peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teori, tetapi juga mampu langsung menerapkan teknik pencatatan dan penyusunan laporan keuangan di Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masing-masing. Pendekatan ini menekankan “learning by doing”, di mana peserta terlibat aktif dalam setiap tahap kegiatan.
2. Tahap Persiapan
   Tahap persiapan merupakan langkah awal yang dilakukan untuk memastikan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan peserta. Kegiatan pada tahap ini meliputi:
   a. Identifikasi Kebutuhan Mitra.
      Tim pelaksana melakukan koordinasi dengan pengurus Jaringan Wirausaha Kota Depok untuk mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan pelaku UMKM terkait pengelolaan biaya usaha dan penghitungan Harga Pokok Penjualan. Identifikasi dilakukan melalui wawancara, diskusi, dan penyebaran kuesioner sederhana kepada peserta.
   b. Penyusunan Materi Pelatihan
      Materi disusun menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman usaha yang beragam.
   c. Persiapan sarana dan prasarana
      Pada tahap ini dilakukan persiapan tempat pelatihan, perangkat presentasi, modul pelatihan, lembar kerja peserta, alat tulis, serta perangkat pendukung lainnya. Selain itu, tim juga menyiapkan instrumen evaluasi berupa pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta.
3. Pelaksanaan Pelatihan
   Tahap pelaksanaan merupakan inti kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pelatihan dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi, demonstrasi, dan praktik langsung diantaranya:
   a) Konsep Dasar Harga Pokok Penjualan
      Peserta diberikan pemahaman mengenai definisi HPP, manfaat HPP, serta hubungan HPP dengan laba usaha dan penentuan harga jual.
   b) Identifikasi Komponen Biaya
      Peserta diajarkan cara mengidentifikasi biaya yang terkait dengan proses produksi, antara lain:
      • Biaya bahan baku.
      • Biaya tenaga kerja langsung.
      • Biaya overhead usaha.
      Pemahaman terhadap komponen biaya menjadi dasar penting dalam penyusunan HPP yang akurat.

   c) Teknik Pencatatan Biaya

Tim memberikan contoh pencatatan biaya yang sederhana dan mudah diterapkan oleh UMKM. Pencatatan dilakukan menggunakan format yang dapat diimplementasikan baik secara manual maupun menggunakan aplikasi sederhana.

d) Perhitungan Harga Pokok Penjualan
Peserta diajarkan langkah-langkah menghitung HPP secara sistematis, mulai dari pengumpulan data biaya hingga penyusunan perhitungan HPP per unit produk.

e) Penentuan Harga Jual Produk
Materi ini membahas cara menentukan harga jual berdasarkan HPP dengan mempertimbangkan margin keuntungan yang diharapkan serta kondisi pasar.

4. Pendampingan dan Evaluasi
Pendampingan lanjutan: Setelah pelatihan, tim memberikan bimbingan untuk memastikan peserta mampu menerapkan ilmu yang diperoleh secara berkelanjutan. Evaluasi keterampilan peserta: Dilakukan melalui penilaian hasil laporan keuangan yang dibuat peserta, serta kemampuan mereka menjelaskan proses pencatatan dan penyusunan laporan. Umpan balik: Tim memberikan saran perbaikan dan rekomendasi pengelolaan keuangan yang lebih tertib dan efisien.

5. Tindak Lanjut
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Jaringan Wirausaha Kota Depok disarankan menyusun Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan keuangan sebagai panduan tetap. Tim pengabdian dapat melakukan monitoring berkala untuk menilai implementasi pelatihan dan memberikan pendampingan tambahan jika diperlukan. Diharapkan dengan adanya tindak lanjut ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan laporan keuangan secara berkelanjutan.

HASIL PELAKSANAAN PKM DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan pada Jaringan Wira Usaha Kota Depok memberikan hasil yang positif dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi para pelaku usaha. Melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, diskusi interaktif, dan pendampingan, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan usaha, pencatatan keuangan, strategi pemasaran digital, serta pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung. Hal tersebut terlihat dari aktifnya peserta dalam sesi tanya jawab, diskusi kelompok, serta praktik penyusunan pencatatan keuangan sederhana yang dapat diterapkan langsung pada usahanya masing-masing. Selain itu, peserta juga mulai memahami pentingnya pemisahan keuangan pribadi dan usaha sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih efektif.

Dari aspek pengelolaan usaha, kegiatan ini mendorong peserta untuk menerapkan pencatatan transaksi secara tertib, menyusun laporan keuangan sederhana, serta memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi dan pemasaran produk. Pemahaman mengenai kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM juga meningkat sehingga peserta memiliki kesadaran yang lebih baik terhadap pentingnya kepatuhan pajak sebagai bagian dari tata kelola usaha yang profesional.

Hasil evaluasi melalui kuesioner dan diskusi akhir menunjukkan bahwa sebagian besar peserta merasa materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan usaha mereka. Peserta juga menyampaikan harapan agar kegiatan pendampingan dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga implementasi materi yang telah diberikan dapat terus dipantau dan dikembangkan.

Secara keseluruhan, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Jaringan Wira Usaha Kota Depok berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam aspek manajemen usaha, akuntansi, perpajakan, dan pemasaran. Diharapkan hasil kegiatan ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan daya saing, keberlanjutan usaha, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Depok.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Jaringan Wira Usaha Kota Depok, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi para pelaku usaha. Melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan pendampingan, peserta memperoleh peningkatan pengetahuan serta pemahaman mengenai pengelolaan usaha yang lebih efektif, pencatatan keuangan yang sistematis, pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran, serta pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Partisipasi aktif peserta selama kegiatan menunjukkan bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Selain meningkatkan wawasan, kegiatan ini juga mendorong peserta untuk mulai menerapkan praktik-praktik pengelolaan usaha yang lebih profesional, seperti melakukan pencatatan transaksi secara rutin, menyusun laporan keuangan sederhana, memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi, dan memahami kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan para anggota Jaringan Wira Usaha Kota Depok mampu meningkatkan kualitas pengelolaan usahanya sehingga dapat memperkuat daya saing, meningkatkan kinerja usaha, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk memperoleh hasil yang lebih optimal, diperlukan adanya pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan agar implementasi materi yang telah diberikan dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dan perkembangan dunia bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Buku Panduan BOS untuk Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan. Jakarta: Kemendikbudristek.

Mulyadi. (2019). Akuntansi Sekolah dan Laporan Keuangan untuk Lembaga Pendidikan. Jakarta: Salemba Empat.

Supriyanto, A., & Widodo, R. (2021). “Implementasi Sistem Akuntansi Sekolah dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan.” Jurnal Pendidikan dan Administrasi, 7(2), 45–55.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.

Wibowo, A. (2020). Manajemen Keuangan Sekolah: Panduan Praktis untuk Bendahara Sekolah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zulfikar, D., & Haryanto, T. (2022). “Pelatihan Laporan Keuangan Berbasis Excel untuk Tenaga Administrasi Sekolah Menengah.” Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, 4(1), 12–20.

Supriyanto, A., & Widodo, R. (2021). “Implementasi Sistem Akuntansi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan.” Jurnal Pendidikan dan Administrasi, 7(2), 45–55.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.

Wibowo, A. (2020). Manajemen Keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Panduan Praktis untuk Bendahara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zulfikar, D., & Haryanto, T. (2022). “Pelatihan Laporan Keuangan Berbasis Excel untuk Tenaga Administrasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Menengah.” Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, 4(1), 12–20.